

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Disusun Oleh:
Satrio Bayu Segoro
NIM. 195221149**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Oleh:

SATRIO BAYU SEGORO

NIM. 19.52.21.149

Surakarta, 14 September 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP

NIP. 19800712 201403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SATRIO BAYU SEGORO
NIM : 195221149
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 September 2023



Satrio Bayu Segoro

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SATRIO BAYU SEGORO
NIM : 195221149
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari *website* <https://www.bpk.go.id/>. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 September 2023



Satrio Bayu Segoro

Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr.i : Satrio Bayu Segoro

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Satrio Bayu Segoro NIM : 19.52.21.149 yang berjudul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”

Sudah dapat di munaqasah kan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasah kan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surakarta, 14 September 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP
NIP. 19800712 201403 1 003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL

Oleh:

SATRIO BAYU SEGORO
NIM. 19.52.21.149


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 M / 20 Rabiul Awal 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Frank Aligarh, M.Sc
NIP. 19920912 2019031 011



Penguji II
Samsul Rosadi, M.Si
NIP. 19871221 2023211 016



Penguji III
Mohamad Irsyad, Lc., M.E
NIP. 19900603 201903 1 005



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M. Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Tetap cengar cengir walaupun masalah terus mengalir”

(Penulis)

“Kau hanyalah seseorang bagi dunia, tapi bagi seseorang kaulah dunianya”

(Penulis)

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Penulis)

“Semuanya tidak pernah akan saling memahami, jika tidak memiliki penderitaan yang sama”

(Pain)

PERSEMBAHAN

Tanpa henti ku ucapkan rasa syukur atas semua karunia dan kemudahan yang
senantiasa Engkau berikan kepadaku Ya Allah.

Dengan segenap doa dan cinta

Karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ibu dan bapak yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat
yang selalu menyertai di setiap langkahku.

Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Khairul Imam, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fahri Ali Ahzar, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, bimbingan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Sutarso dan Ibu Sri Sumartini, terima kasih atas segala doa dan pengorbanan serta kasih sayangmu yang tak pernah terlupakan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan selama menyusun skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 September 2023

Penulis

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of local revenue, capital expenditure and regional government size on internal control weaknesses in the Central Java Regional Government in 2017-2019. This study uses documentation as data collection material, which is analyzed with the help of Eviews software. The population in this study is the Regional Government of the Regency/City of Central Java Province, totaling 29 Regencies and 6 Cities in 2017-2019. The sampling technique used purposive sampling and obtained a sample of 105 data.

The results of the analysis show that local revenue has a negative effect on internal control weaknesses, capital expenditure has a positive effect on internal control weaknesses, while regional government size has no effect on internal control weaknesses.

Keywords: *Regional Original Revenue, Capital Expenditures, Size of Local Government, Internal Control Weaknesses*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai bahan pengumpulan data, yang di analisis dengan bantuan *software* Eviews. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota pada tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 105 data.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal, belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Kelemahan Pengendalian Internal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Jadwal Penelitian	10
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Teori.....	13
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Berpikir	25
2.4 Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian	32
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	32
3.4 Data dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Variabel Penelitian	34
3.7 Definisi Operasional Variabel	35
3.8 Teknik Analisis Data	36
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Penelitian	43
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data	44
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	44
4.2.2. Estimasi Pemilihan Model	45
4.2.3. Uji Regresi	46
4.2.4. Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.5. Uji Ketepatan Model.....	53
4.2.6. Hasil Analisis Regresi Data Panel	54
4.2.7. Uji Hipotesis	55
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data.....	57
4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	57
4.3.2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	59
4.3.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	61
BAB V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1	Kriteria Penentuan Sampel	43
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.3	Hasil Pengujian CEM	45
Tabel 4.4	Hasil Uji Chow.....	46
Tabel 4.5	Hasil Uji Hausman	47
Tabel 4.6	Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	48
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	53
Tabel 4.11	Hasil Uji F.....	54
Tabel 4.12	Hasil Analisis Regresi Data Panel	54
Tabel 4.13	Hasil Uji T.....	56
Tabel 4.13	Hasil Pengujian Hipotesis	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas	49
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
------------------------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	70
Lampiran 2 Hasil Pengumpulan Data	71
Lampiran 3 Data Variabel Dependen dan Independen	71
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	80
Lampiran 6 Cek Plagiarisme	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1998 sejak dimulainya masa reformasi, banyak berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terlibat dalam peristiwa tersebut. Pasca reformasi Indonesia, sistem pemerintahan menggunakan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi yang memberikan dorongan terhadap pemerintah daerah dan provinsi untuk mengambil alih wilayahnya sendiri. (Martani & Zaelani, 2011)

Pemerintah pusat ingin agar pemerintah daerah tahu bahwa mereka mampu memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pendahulunya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan sistem desentralisasi. Sangatlah penting untuk mengikuti standar yang berlaku saat ini untuk menyediakan kode area yang semakin besar. (Martani & Zaelani, 2011)

Kehadiran otoritas daerah yang mengawasi pengelolaan dana secara adil, logis, transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif di wilayahnya merupakan prasyarat bagi pemerintah daerah untuk mendeklarasikan otonomi daerah. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh merupakan tujuan otonomi daerah, mengingat suatu permasalahan sosial menjadi kewenangan pemerintah daerah. (Hartono et al., 2014)

Tidak hanya itu, kehadiran kelompok otonomis di wilayah tersebut juga membuat masyarakat lebih mudah mengakses pengumuman publik dari pemerintah. Dengan menggunakan jasa pelayanan publik yang tersebar luas dan hadir di berbagai daerah diharapkan mampu meredakan ketegangan lintas daerah seperti sebelum era reformasi. Konflik antar etnis yang sedang berlangsung di Indonesia disebabkan oleh wilayah negara yang sangat luas, yang membentang dari pantai barat daya Sabang hingga pantai tenggara Merauke. Bukan berarti Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi jembatan antar bangsa. Daerah ini diharapkan mampu memberikan kedamaian tanpa syarat kepada setiap warga negara Indonesia melalui desentralisasi atau otonomi. (Hartono et al., 2014)

Dengan adanya kontrol dan pengawasan yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, serta mengurangi potensi gangguan. Hal ini diperkirakan pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan tata kelola yang sukses. Kecurangan yang sering terjadi pada suatu entitas atau lembaga pemerintah disebabkan oleh entitas tersebut memiliki proses pembangunan internal yang ramping. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa penyimpangan atau penyimpangan tersebut tidak terjadi, pemerintah harus melakukan penelitian internal yang efektif sebagai bagian dari perencanaan strategis yang berkelanjutan. (Pasha, 2020)

Sistem pengendalian internal yang memadai menjadi landasan pengelolaan APBN dan APBD, dan persyaratan akuntansi pemerintahan telah dipenuhi dalam seluruh proses akuntansi keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

yang mengatur tentang SPIP mengatur tentang penelitian internal pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengendalian internal ditetapkan atas dasar organisasi untuk menjaga aset dari kerusakan, pencurian, dan penggunaan yang tidak efisien sekaligus meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pada sektor keuangan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di bidang pasar valuta asing berdampak pada perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, tindakan para pejabat terpilih terlihat jelas di beberapa kota besar; sebaliknya, untuk mencapai tata kelola yang baik, tindakan-tindakan tersebut harus dikoordinasikan dengan alat atau kerangka kerja yang memungkinkan negara mengelola keuangannya dengan cara yang lebih obyektif, logis, transparan, dan partisipatif. (Pasha, 2020)

Sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” mengenai perda dan “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004” mengenai “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan suatu daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah “. Pemerintah Daerah menyelenggarakan operasional pengelolaan PAD 24/7 secara resmi. Jika PAD berada di wilayah dengan kepadatan tinggi, kemungkinan besar PAD akan mempunyai tenaga kerja internal yang besar. (Iqbal et al., 2017).

Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, modal belanda yang disetujui adalah pengadaan aset tetap dengan masa manfaat maksimal lebih dari satu tahun dan disetujui untuk tujuan membawa aset atau kekayaan ke daerah dan

menyediakan kebutuhan masyarakat umum. dengan bantuan. Akibat potensi terjadinya kondisi yang sangat rawan selama proses pengadaan aset, banyak proyek belanja modal yang dilaksanakan selama proses ini masih memberikan hasil yang baik bagi pengembangan penelitian magang di wilayah pemerintah. (Kiswanto et al., 2020)

Tolak Ukuran Pemerintah Daerah dapat ditunjuk sebagai ukur tunggal yang paling penting untuk digunakan untuk mengukur pemerintah daerah yang sekecil mungkin. ukuran pemerintah daerah yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dan dengan jumlah yang cukup besar, maka akan meningkatkan tekanan terhadap organisasi pengelola pemerintahan untuk meningkatkan pengawasan yang efektif melalui pengembangan sistem komunikasi internal.. (Hartono et al., 2014).

Pada hari Senin tepatnya tanggal 29 April 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan (LHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Kab. Karanganyar. Laporan hasil pemeriksaan tersebut langsung diterima oleh Ayub Amali selaku kakanal BPK Provinsi Jawa Tengah. Ayub Amali menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas LKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2018. BPK juga masih menemukan permasalahan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan BPK menemukan adanya pajak yang belum dipungut, penatausahaan aset yang juga belum

memadai. Ayub Amali selaku Kalan BPK Provinsi Jawa Tengah meminta agar pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dan menindak lanjuti rekomendasi BPK yang telah tercantum pada LHP. BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD guna memberikan pernyataan opini yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan (SAP) atau Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

[\(https://jateng.bpk.go.id/bpk-jateng-serahkan-lhp-atas-lkpd-kabupaten-karanganyar-ta-2018/\)](https://jateng.bpk.go.id/bpk-jateng-serahkan-lhp-atas-lkpd-kabupaten-karanganyar-ta-2018/)

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang kelemahan pengendalian internal di pemerintah daerah antara lain (Andesti & Agustin, 2022) menyatakan bahwa kompleksitas daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Merina et al., (2021) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Size (ukuran) pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, Kompleksitas daerah, Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Kiswanto et al., (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, belanja modal, temuan kelemahan pengendalian internal tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan *leverage* dan

kompleksitas daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Saferi & Mulyani, (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan kompleksitas pada pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pada pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Barat tahun 2014-2017. Alawiyah et al., (2020) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah, Belanja Modal dan Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pasha, (2020) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Ukuran Entitas Pemerintah (Size) berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Yaya & Suprobo, (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, Kompleksitas pemerintah daerah, Kualitas sumber daya manusia dan Penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Adha et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran entitas yang diproksikan dengan total aset memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kementerian PUPR, ukuran entitas yang diproksikan dengan total anggaran belanja memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kementerian PUPR, Kompleksitas yang diproksikan dengan jumlah

satuan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan SPI pada Kementerian PUPR.

Gumilan & Putra, (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017. Safitri & Kiswanto, (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kelemahan Pengendalian internal. Belanja modal berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal

Penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya antara lain (Alawiyah et al., 2020), (Pasha, 2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan (Gumilan & Putra, 2019), (Merina et al., 2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ditemukannya beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian internal, adanya potensi pajak yang belum dipungut dan penataan aset yang belum memadai.
2. Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya pada variabel pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah

1.3. Batasan Masalah

Peneliti mengkarakterisasi permasalahan sebagai berikut agar fokusnya lebih sempit dan tidak meluas:

1. Lingkup penelitian hanya meliputi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang informasi di atas terlihat jelas bahwa rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal?

3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Bagi Akademisi

Dapat berkontribusi pada kumpulan pengetahuan dan berfungsi sebagai sumber daya, khususnya bagi mahasiswa yang berencana untuk menghasilkan artikel ilmiah tentang subjek yang sama yaitu, dampak ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan pendapatan terhadap kelemahan pengendalian internal.

2. Bagi pembaca

Salah satu bahan bacaan ilmu pengetahuan dan bahan penelitian selanjutnya tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini berpedoman pada sistematika pedoman kerja ilmiah. Metodologi penulisan berikut akan digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II akan menguraikan tentang kajian teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB IV akan menguraikan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil data, pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

BAB V akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada tiap bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Stakeholder Theory* (Teori Stakeholder)

Teori *stakeholder* menggambarkan bagaimana pemerintah harus dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya (Harmoni, 2013). Teori stakeholder dipakai untuk mendukung penggunaan variabel yang berkaitan dengan ukuran pemerintah sebagai prediktor masalah pengendalian internal. Pemerintahan yang besar juga akan memiliki banyak sumber daya untuk membantunya melaksanakan tanggung jawabnya. Ada kemungkinan penipuan yang signifikan mengingat jumlah sumber daya yang dimiliki (Harmoni, 2013).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah akan menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari para pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya yang dimilikinya kepada stakeholder (Kristanto, 2009). Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, pemerintah akan memperluas penggunaan pengendalian internal yang memadai atas penggunaan sumber daya yang tersedia. (Safitri & Kiswanto, 2019).

2.1.2 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) berfokus pada ikatan kontraktual yang ada antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan keagenan, satu pihak (*principal*) memberikan tugas kepada pihak lain (*agent*) untuk diselesaikan. Menurut teori keagenan, orang tidak dapat mengandalkan agen untuk berperilaku demi kepentingan terbaik mereka. (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan mengasumsikan bahwa ada *information asymmetry* yang besar antara agen (pemerintah) dan subjek (masyarakat) yang memiliki akses langsung ke informasi yang dibutuhkan. Adanya *information asymmetry* menguatkan terjadinya korupsi atau kecurangan agen. Akibatnya, untuk menghilangkan asimetri informasi, Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pengendalian internal (Fama & Jensen, 1983).

Menurut teori keagenan, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan sepenuhnya. *Asimetry information* dapat dikurangi dengan membuat Pemerintah Daerah lebih akuntabel agar warga negara memperoleh informasi yang lebih netral dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. (Jensen & Meckling, 1976).

Organisasi publik dapat menggunakan teori keagenan. Seperangkat hubungan prinsipal-agen merupakan fondasi demokrasi kontemporer. Metode penting untuk membedah inti komitmen kebijakan publik BRA adalah paradigma hubungan prinsipal-agen. Kebijakan publik dibuat dan

dilaksanakan sehubungan dengan masalah kontrak, khususnya informasi asimetris (asimetri NIVERS information ss).

2.1.3 Kelemahan Pengendalian Internal

Sejauh mana pengendalian internal sesuai dengan standar audit yang diadopsi, terutama standar audit nasional, mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal. Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi publik. (Kristanto, 2009)

Pengendalian internal Pemerintah Daerah telah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dapat menggunakan hasil audit BPK sebagai indikator penilaian. Kelemahan pengendalian internal dirancang oleh BPK melalui tiga perspektif (Pasha, 2020) yaitu (1) kelemahan pada kerangka pengendalian internal; (2) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; dan (3) kelemahan sistem pengendalian dalam pelaksanaan APBD.

Kelemahan pengendalian internal menyebabkan masalah serius dalam pelaporan keuangan, namun konsekuensinya jarang yang tidak dapat dihindari atau ditangkap. Bagi setiap perusahaan, khususnya pemerintah daerah, pengendalian internal sangat penting dalam mengatur dan memantau terjadinya kecurangan (Yeni et al., 2012)

Kelemahan pengendalian internal adalah kelemahan utama yang mengakibatkan jauh dari situasi kesalahan penyajian yang serius dalam

laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau ditemukan, menurut Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka (PCAOB) di (Hartono et al.,(2014). Menurut Pasal 5 Pasal 23 UUD 1945, Badan Pengawas Keuangan (BPK) bertugas mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah serta mengawasi dan memeriksa lembaga pemerintah (Putri & Mahmud, 2015)

2.1.4 Pengendalian Internal

Pada tahun 2016, Ikatan Akuntan Indonesia Untuk menjamin keakuratan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan, dewan direksi, manajemen, dan pekerja lainnya menggunakan prosedur pengendalian internal. Pengendalian internal adalah definisi yang berlaku untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi sebagai organisasi atau perusahaan yang tidak diinginkan, karena mereka memiliki pembatasan pada organisasi atau perusahaan dalam mengelola semua proses bisnis. Risiko ini tidak dapat menerima atau mengakses data, seperti karyawan atau pengguna, seperti penggunaan data yang salah yang tidak dapat mengakses data tersebut (Rahmiyatun & Lestari, 2018)

Tujuan pengendalian internal yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan pimpinan yang melapor kepada mereka, serta definisi pengendalian internal itu sendiri, adalah untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keakuratan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi

operasi, dan kepatuhan terhadap hukum (Aini, 2012). Menurut (Martani & Zaelani, 2011), Dewan komisaris, manajemen, dan mereka yang bertanggung jawab kepada mereka menggunakan prosedur yang dikenal sebagai pengendalian internal untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian untuk meningkatkan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait, terpenuhi.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui operasi yang efektif dan efisien, manajemen senior dan setiap karyawan terlibat dalam proses tindakan dan aktivitas yang berkelanjutan dan terintegrasi yang dikenal sebagai pengendalian internal. Definisi ini diadopsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008. pelaporan keuangan yang efisien dan terpercaya, perlindungan aset bagi pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kerentanan pengendalian internal. Pemerintah daerah memiliki sumber uang lokal untuk ruang toko. Suatu daerah akan mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai tujuan otonomi daerahnya apabila mempunyai PAD yang cukup besar. Tidak diragukan lagi, PAD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah dan sumber pembiayaannya. Skala usaha dapat berdampak pada masalah pengendalian internal. (Putri & Mahmud, 2015).

Pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, seperti pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Kemampuan suatu daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah, seperti mengembangkan kehidupan demokrasi yang adil dan merata, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga hubungan yang serius antara pusat dan keunggulan negara kesatuan republik Indonesia, sebagian tergantung dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerah tersebut (Kristanto, 2009)

2.1.6 Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP 71 Tahun 2010 mendefinisikan belanja modal sebagai penggunaan rencana pengeluaran untuk mengamankan sumber daya tetap dan sumber daya lain yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi sebagai ciri pengembangan modal yang terdiri dari perluasan aset tetap aset yang memberikan keuntungan, termasuk penggunaan untuk mendukung biaya yang harus mengikuti atau meningkatkan keberadaan organisasi, serta inc. (Aini, 2012)

Bagian penggunaan langsung dari rencana pengeluaran publik yang menghasilkan hasil sebagai sumber daya tetap disebut belanja modal. Sumber daya tetap yang digunakan dibagi menjadi dua kategori: sumber daya yang digunakan oleh daerah atau berhubungan langsung dengan administrasi

publik (misalnya perancah, jalan, trotoar, arena, bangunan olah raga, kereta api, rambu lalu lintas, dan halte transportasi) dan sumber daya tetap yang digunakan yang tidak dimanfaatkan oleh daerah secara langsung. lokal (seperti perusahaan pemerintah). (Iqbal et al., 2017).

Menurut kebijakan publik, sebagian besar belanja modal dikaitkan dengan penyediaan layanan publik, oleh karena itu belanja perencanaan tahunan harus cukup besar. Namun belanja modal tidak selalu terkait langsung dengan penyediaan layanan publik. Secara teoritis, ada banyak cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, termasuk akuisisi, pertukaran dengan aset tetap lainnya, dan konstruksi sendiri. Namun, pembelian sebagian besar merupakan cara otoritas publik mencapai hal ini. (Safitri & Kiswanto, 2019).

Belanja modal adalah dana publik yang digunakan untuk mengoperasikan unit-unit yang menyediakan layanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, individu yang ceroboh sering melakukan penipuan, yang dapat merugikan pemerintah. Kemungkinan kecurangan pemerintah daerah meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Saputro & Mahmud, 2015).

2.1.7 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran suatu entitas dijadikan pada hakikatnya sebagai acuan untuk mengklasifikasikan skala besar atau kecilnya suatu entitas untuk mengetahui sebagian besar entitas tersebut. Total aset adalah skala pengukuran yang dapat digunakan untuk memanipulasi besar kecilnya suatu daerah pemerintah tertentu dalam konteks pemerintahan daerah. (Putri dan Mahmud, 2015).

Ukuran pemerintah daerah akan sama dengan jumlah total yang telah dicapai. Oleh karena itu, total aset pmda akan menunjukkan bahwa besarnya pmda secara keseluruhan akan sama dengan atau lebih besar. Menurut sumarjo (2010) efektivitas inisiatif pemerintah yang dilakukan di daerah manapun dengan tujuan pemberdayaan masyarakat akan terhambat oleh total aset yang besar.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1.	Andesti & Agustin, (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif 2. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota yang berada di provinsi aceh dan sumatera utara tahun 2017-2019 yang berjumlah 56 kabupaten/kota 3. Sampel terdiri atas 52 kabupaten/kota 	Kompleksitas daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
2.	Merina et al., (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 2. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan

		<p>kabupaten/kota se-sumatera selatan yang telah diaudit oleh BPK RI tahun 2015-2017</p> <p>3. Sampel terdiri dari 51 kabupaten/kota</p>	<p>pengendalian intern. Size (ukuran) pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, Kompleksitas daerah, Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.</p>
3.	Kiswanto et al., (2020)	<p>1. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif</p> <p>2. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten/Kota Indonesia Barat.</p> <p>3. Sampel penelitian ini adalah Jumlah laporan keuangan sebanyak 263 laporan</p>	<p>Pendapatan asli daerah, belanja modal, temuan kelemahan pengendalian intern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Leverage dan kompleksitas daerah tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.</p>
4.	Saferi & Mulyani, (2020)	<p>1. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif</p> <p>2. Populasi yang digunakan yaitu LKPD seluruh kab/kota di Sumatera Barat pada tahun 2014-2017</p> <p>3. Sampel penelitian ini adalah 19 LKPD kab/kota di Sumatera Barat</p>	<p>Pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pada pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pada pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Barat</p>

			tahun 2014-2017.
5.	Alawiyah et al., (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif 2. Populasi yang digunakan adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 39 tahun 2016, 2017, 2018 sehingga populasi berjumlah 117 3. Sampel yang digunakan adalah 117 data 	Ukuran Pemerintah, Belanja Modal dan Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
6.	Pasha, (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif 2. Populasi pada penelitian ini adalah pemda provinsi di Indonesia 3. Sampel yang digunakan adalah pemda kabupaten/kota pada pulau Jawa serta Bali 	Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Ukuran Entitas Pemerintah (Size) berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.
7.	Yaya & Suprobo, (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif 2. Populasi yang digunakan adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia 3. Sampel yang digunakan adalah 83 laporan hasil pemeriksaan BPK RI mulai tahun 2012 sampai dengan 	Ukuran pemerintah daerah, Kompleksitas pemerintah daerah, Kualitas sumber daya manusia dan Penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

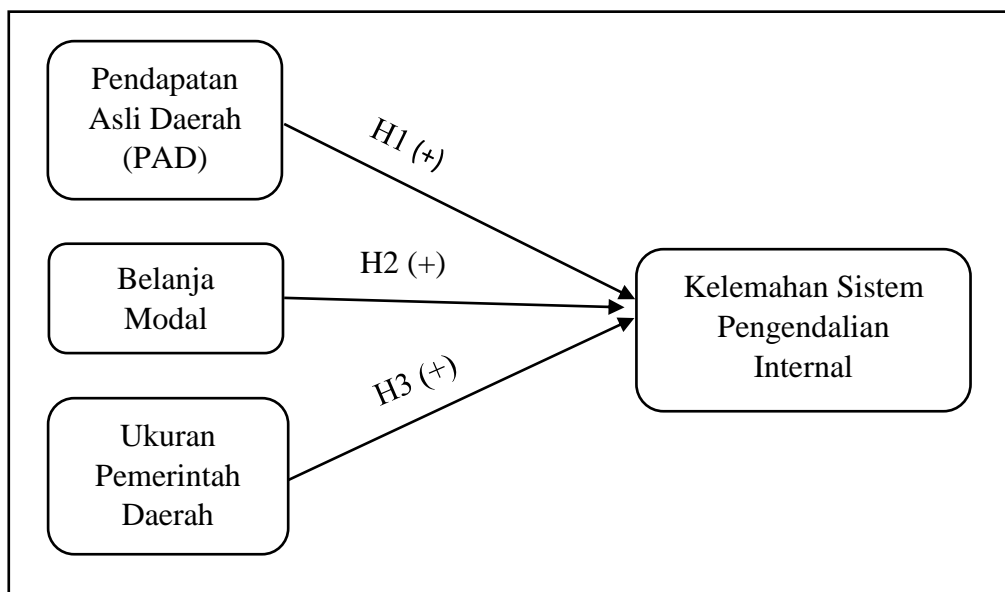
		tahun anggaran 2016 antara tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.
8.	Adha et al., (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif 2. Populasi yang digunakan adalah 11 Unit Eselon I dengan jumlah time series yaitu tiga tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2017 3. Sampel yang digunakan sebanyak 33 unit 	Ukuran entitas yang diproksikan dengan total aset memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kementerian PUPR Ukuran entitas yang diproksikan dengan total anggaran belanja dan Kompleksitas yang diproksikan dengan jumlah satuan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kementerian PUPR
9.	Gumilan & Putra, (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif 2. Populasi yang digunakan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 3. Sampel yang digunakan adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota 	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal

			berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017.
10.	Safitri & Kiswanto, (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 2. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 122 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. 3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 83 laporan keuangan 	Pendapatan asli daerah PAD, ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Belanja modal berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran menjelaskan keterkaitan dan alur pemikiran yang mengungkap bagaimana variabel-variabel penelitian saling berkaitan satu sama lain. Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kompleksitas daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran seperti yang tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Dengan memperhatikan permasalahan yang ditemukan dalam kajian teoritis dan hasil penyelidikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian berikut dapat dikembangkan.

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari sumber-sumber yang berada di dalam daerah itu sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah (Iqbal et al., 2017). Upaya sungguh-sungguh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah yang dimaksud merupakan sumber pendapatan asli daerah. Contohnya adalah pendapatan asli daerah yang sebenarnya, sebagian pendapatan usaha milik daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Meskipun kuantitas pendapatan daerah yang diperoleh dari setiap transaksi biasanya berada di bawah batas tertentu, namun frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi. (Kristanto, 2009)

Dalam PAD, pemerintah daerah berperan sebagai prinsipal dan warga negara sebagai agen. Masyarakat telah mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, terutama dalam hal transparansi pengelolaan sumber daya yang diperoleh melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah (Safitri & Kiswanto, 2019)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) relevan dengan teori *stakeholder*, karena pemerintah mampu melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, seperti kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, maka kebijakan tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat guna memajukan tujuan kesejahteraan (Safitri & Kiswanto, 2019).

Ada studi kasus dari BPK Jateng 2021 yang menunjukkan 984 kelemahan sistem internal ditemukan. Kelemahan tersebut meliputi 371 (38%) kelemahan pada akuntansi dan pelaporan, 381 (39%) kelemahan pada perilaku anggaran pendapatan dan belanja, dan 232 (23%) kelemahan pada struktur internal sistem pengendalian.

Pemegang mungkin akan mengalami kendala karena semakin banyaknya sumber pendapatan yang tersedia dalam Pendapatan Asli Daerah. (Petrovits et al., 2010). Hal ini karena kemungkinan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keresahan dan pemberontakan yang berkepanjangan. Pemerintah daerah dengan jumlah pendapatan yang tinggi melakukan investigasi terhadap mereka yang telah dirusak. (Saferi & Mulyani, 2020)

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, situasi di atas dapat diperbaiki dengan menerapkan sistem rekrutmen internal dari stakeholder internal maupun eksternal organisasi Kecurangan atau Fraud pendapatan daerah yang ada dapat berupa pemanfaatan dana daerah dengan cara-cara yang melawan hukum dan berujung pada korupsi atau penggelapan. (Saputro & Mahmud, 2015)

Kiswanto et al., (2020), Alawiyah et al., (2020), dan Pasha, (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Semakin tinggi sumber pendapatan pada pendapatan asli daerah maka semakin tinggi resiko kelemahan pengendalian internalnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

2. Pengaruh belanja modal terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Untuk keperluan pengembangan modal atau aset tetap untuk kelangsungan operasi diperlukan adanya belanja modal. Tujuan belanja modal adalah memberikan bantuan kepada masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kesejahteraan masyarakat. (Safitri & Kiswanto, 2019)

Belanja modal relevan dengan teori *agency*, karena *agent* (pemerintah) dapat dengan baik menginisiasi dan melakukan pengawasan terhadap modal belending sesuai dengan kebutuhan *principal* (masyarakat). Konflik antara *agent* (pemerintah) dan *principal* (rakyat) dihasilkan dari asimetri pengetahuan yang memungkinkan insiden korupsi atau pencurian terjadi di dalam organisasi *agent* (Pemerintah). (Safitri & Kiswanto, 2019)

Jalan, sistem irigasi, gedung, bangunan, dan lain-lain dalam bentuk fisik yang berbeda adalah beberapa contoh komponen pengeluaran yang dapat

dimasukkan dalam biaya perolehan modal. Dikaitkan dengan perdagangan komoditas fisik atau berwujud dan pertukaran kekayaan sangatlah tidak dapat diandalkan. Ketika suatu negara memiliki sejumlah besar taruhan modal yang terkait dengannya, ketinggian yang dibutuhkan untuk pengadaan aset menjadi semakin tinggi. Mekanisme lelang atau lelang digunakan untuk proses aset tetap dalam lingkungan pemerintah daerah.

Pada terjadinya proses tender, akan dipilih pemerintah yang menjunjung tinggi etika serta mampu melaksanakan perencanaan yang baik untuk memimpin proyek pengerahan aset tetap, Proyek penjualan barang ini mengandung banyak resiko dan menimbulkan kecurangan yang menjadi perhatian pemerintah. Sesuai dengan logika, mengingat Karena banyaknya proyek yang dilakukan pemerintah daerah untuk membeli komoditas, kemungkinan terjadinya penipuan dalam program ini meningkat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya volume transaksi modal, akan terjadi kelemahan pengendalian internal.

Safitri & Kiswanto, (2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah belanja modal maka semakin tinggi terjadinya kecurangan yang akan mempengaruhi terjadinya kelemahan pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

3. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Suatu rentang nilai yang menunjukkan ukuran kondisi pemda yaitu size (Hartono, 2014). Ukuran yang ada pada entitas tertentu biasanya berfungsi untuk menggagalkan segala upaya diskusi mengenai bentuk entitas tersebut. Dalam keadaan saat ini, hubungan antara Pemerintah dan Pemda sedemikian rupa sehingga Pemda sebagai agen tunggal harus melaksanakan Pencatatan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna meningkatkan kredibilitas Pemerintah.

Ukuran Pemerintah Daerah relevan dengan teori *stakeholder*, karena teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. (Alawiyah et al., 2020)

Organisasi berskala besar diasumsikan memiliki landasan ekonomi yang kuat dan mampu tumbuh serta berhasil melaksanakan promosi internal. Organisasi didalam organisasi juga memperlihatkan tingkatan aktivitas yang ada didalamnya. Pemerintah daerah dengan ukuran organisasi yang kecil biasanya mempunyai tingkat aktivitas yang rendah, sedangkan organisasi dengan ukuran organisasi yang besar biasanya memiliki tingkat aktivitas yang

tinggi. Total aset yang besar akan menghambat keberhasilan penyelesaian tugas-tugas pemerintahan yang penting dalam rangka pembinaan tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. (Pasha, 2020)

Pemerintah daerah dengan aset tinggi cenderung memiliki kelemahan pengendalian internal yang tinggi. Ukuran pemerintahan semakin besar, tanpa adanya pembangunan maka pengendalian intern pemerintah daerah akan melemah. Sebaliknya, pengendalian intern pemerintah daerah akan efektif jika ukuran pemerintahannya kecil karena permasalahannya relatif lebih sedikit. (Safitri & Kiswanto, 2019)

Yaya & Suprobo, (2019), Saputro & Mahmud, (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Semakin tinggi total aset yg dimiliki pemerintah daerah maka semakin tinggi terjadinya kecurangan yang akan mempengaruhi kelemahan pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengevaluasi hipotesis yang dikemukakan dengan memeriksa populasi tertentu, mengumpulkan data menggunakan metode penelitian, dan mengevaluasi data kuantitatif. (Sugiyono, 2019).

3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian

Masa penelitian dijadwalkan dimulai pada bulan September 2022 sejak dibuatnya proposal penelitian dan berakhir pada saat selesai. Pada tahun 2017 hingga 2019, penelitian ini dilakukan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dari mereka. (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota pada tahun 2017-2019

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari kuantitas dan kualitas populasi yang dimilikinya. (Sugiyono, 2019). Pemilihan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel dengan memberikan kriteria tertentu disebut dengan *Purposive sampling*. Berdasarkan metode pemilihan sampel diperoleh sampel sebanyak 105 data.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang diterapkan. Pengambilan sampel purposif adalah metode pengambilan sampel, dan memenuhi sejumlah persyaratan. (Sugiyono, 2019). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian.
2. Laporan Pemerintah Keuangan Daerah yang telah diaudit oleh BPK.

3.4 Data dan Sumber Data

Data tingkat kedua digunakan dalam penyelidikan ini. Data yang dikumpulkan oleh penanggung jawab data biasanya menggunakan orang lain atau dokumen disebut sebagai data sekunder. (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Tengah dan berkaitan dengan keuangan Kabupaten se-Jawa Tengah periode tahun 2017 hingga 2019. Sumber data penelitian ini adalah website BPK-RI (www.bpk.go.id).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi; secara spesifik merupakan praktik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah ada dan berasal dari organisasi-organisasi yang telah mengumpulkan data terkait tersebut serta melalui internet atau situs resmi suatu instansi pemerintah..

3.6 Variabel Penelitian

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas disebut dengan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal.

3.6.2 Variabel Independen

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) disebut dengan Variabel independen (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, ukuran pemerintah daerah.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y)	kelemahan pelaporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau dikenali tetapi tetap memiliki efek negatif. (Kiswanto et al., 2020)	Jumlah temuan kasus BPK atas kelemahan pengendalian internal di LHP Kiswanto et al., (2020)
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan asli daerah adalah uang yang dihasilkan di dalam suatu daerah dengan memanfaatkan dan mengolah potensi yang dimilikinya. (Pasha, 2020)	$PAD = \frac{total\ PAD}{1\ M}$ Pasha, (2020)
3	Belanja Modal	Belanja Modal adalah mata uang suatu negara yang digunakan untuk mendistribusikan uang atau barang kepada masyarakat dalam rangka memberikan bantuan dan mengangkat derajat rakyat. (Kiswanto, 2019)	$Belanja\ Modal = \frac{total\ Belanja\ Modal}{1\ M}$ Samhah, (2018)
4	Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah merupakan sebuah skala yang menunjukkan besar kecilnya kondisi Pemerintah Daerah (Andesti & Agustin, 2022)	$Ukuran\ Pemerintah\ Daerah = \frac{total\ Ukuran\ Pemerintah\ Daerah}{1\ M}$ Andesti & Agustin, (2022)

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan ketelitian yang baik dengan memanfaatkan teknik statistik yang dikembangkan oleh program *Eviews* 12. Terdapat beberapa tahap dalam menganalisis data ini.

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diartikan sebagai ilmu yang mempelajari statistik yang menggunakan mean, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum (distribusi selisih) untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan data tertentu. (Ghozali, 2021).

3.8.2 Analisis Pemilihan Model

Common Effect Model (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) adalah tiga model yang dapat digunakan untuk memperkirakan regresi menggunakan data panel.

1. *Common Effect Model*

Pendekatan *Common Effect Model* dikenal juga dengan istilah *Pooled Least Squares* atau *Common Effect Model Estimation*. Kinerja individu bersifat konstan dari hari ke hari karena model ini tidak memperhitungkan karakteristik individu atau temporal. Hanya data deret waktu dan data *cross-sectional* yang digunakan untuk membentuk kelompok dalam model saat ini. Ini menggunakan estimasi kuadrat terkecil, yang biasa disebut sebagai kuadrat terkecil gabungan. (Basuki & Prawoto, 2017).

2. *Fixed Effect Model*

Model efek tetap mengasumsikan bahwa setiap individu akan mengalami dampak yang berbeda. Penerjemah yang berbeda dapat menangkap perbedaannya. Akibatnya, setiap individu akan menggunakan estimasi variabel dummy sebagai parameter yang tidak diketahui dalam model efek tetap. Nilai intersep yang konsisten untuk setiap unit penampang harus ditentukan dengan tetap menggunakan koefisien kemiringan yang konstan agar dapat secara akurat mencerminkan setiap unit penampang dalam model regresi data panel. (Basuki & Prawoto, 2017).

3. *Random Effect Model*

Dalam situasi di mana faktor-faktor gangguan mungkin terkait satu sama lain sepanjang waktu dan antar individu, metodologi ini memperkirakan data panel. Ketentuan kesalahan setiap perusahaan mengakomodasi serangkaian intersep yang berbeda untuk model Random Effect. Penghapusan heteroskedastisitas merupakan keuntungan dari penggunaan pendekatan ini. Pendekatan Error Component Model (ECM) dan Generalized Least Square (GLS) adalah nama lain untuk model ini. (Basuki & Prawoto, 2017)

3.8.3 **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Regresi data panel memiliki alat seleksi untuk memilih model yang paling sesuai untuk analisis data. Berikut rincian kalimat kejadian tersebut:

1. Uji Chow (FEM)

Alat untuk membedakan *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah uji Chow. Dalam membandingkan probabilitas dilakukan Uji Chow agar model FEM lebih unggul dari model CEM jika probabilitasnya kurang dari 0,05. ketika F lebih mungkin terjadi daripada 0,05. Dibandingkan model FEM, model CEM lebih menguntungkan.. (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. Uji Hausman (REM)

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam pemodelan. Eksperimen ini membandingkan probabilitas *chi-kuadrat* dengan signifikansi statistik. Jika nilai *chi-square* kurang dari 0,05 maka model FEM lebih baik dibandingkan model REM. Jika nilai *chi-square* lebih besar dari 0,05 maka model REM direkomendasikan dibandingkan model FEM. (Ghozali & Ratmono, 2017)

3. Uji Lagrange Multiplier (CEM)

Salah satu metode untuk membedakan model antara *Random Effect Models* (REM) dan *Common Effect Models* (CEM) adalah Uji Lagrange Multiplier. Eksperimen dilakukan dengan asumsi bahwa *Common Effect Model* (CEM) yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan. CEM merupakan model default yang digunakan jika nilai *chi-square* lebih besar dari 0,05. (Ghozali & Ratmono, 2017)

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memastikan adanya penyimpangan klasik tertentu atau korelasi regresif yang telah diprediksi sebelumnya. Empat kategori penilaian dasar dalam uji asumsi tradisional adalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas memeriksa sebaran variabel residu, perancu, dan model regresi untuk melihat apakah mengikuti distribusi normal. Untuk memastikan apakah sebaran datanya normal atau tidak digunakan uji *Jarque-Bera*. Pendekatan statistik untuk memastikan apakah sebaran data normal adalah uji *Jarque-Bera*. Jika probabilitasnya lebih tinggi dari 5% atau 0,05, data akan didistribusikan secara teratur. (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas mengevaluasi saling ketergantungan variabel independen dalam model regresi. Jika koefisien simetri antar masing-masing variabel lebih dari 0,8 maka akan terdapat indikator multikolinear. (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, pendekatan Uji *Gletser* digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas. Data dikatakan berdasarkan heteroskedastisitas jika kemungkinannya lebih besar dari 0,05. (Ghozali & Ratmono, 2017).

4. Uji Autokorelasi

Dengan menggunakan uji LM, autokorelasi dihitung dalam penelitian ini. *L Odds ratio Obs*R-Squared* untuk menentukan apakah ada autokorelasi atau tidak. Tidak terdapat autokorelasi jika ($p > 0,05$). (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.8.5 Uji Ketepatan Model

1. Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi relatif berbagai variabel independen dan hubungannya satu sama lain. Rentang koefisien determinasinya adalah 0 sampai 1. Kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen semakin meningkat seiring dengan meningkatnya koefisien determinasi. (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. Uji F

Penyelidikan ini menyangkut apakah setiap variabel independen dalam model mempunyai dampak terhadap variabel dependen baik secara mutually eksklusif atau simultan. (Ghozali & Ratmono, 2017). Adapun kriteria pengambilan keputusan dari uji F yaitu:

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

3.8.6 Analisis Regresi Data Panel

Istilah "*regresi*" mengacu pada studi data deret waktu dan lintas bagian dengan menggunakan panel data. berarti menentukan bentuk persamaan untuk

setiap variabel dalam analisis saat ini. Adapun persamaan regresi data panel pada penelitian ini dapat dirumuskan dengan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1t + \beta_2 X_2t + \beta_3 X_3t + et$$

Keterangan:

Y = Kelemahan Pengendalian internal

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja Modal

X3 = Ukuran Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

e = *error team*

3.8.7 Uji Hipotesis

Analisis regresi merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Sudut hubungan antara dua faktor independen dan variabel dependen, serta adanya variabel tambahan, dapat ditentukan dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi menghasilkan perkiraan untuk mengidentifikasi tujuan atau sifat interaksi antar variabel.

Terdapat variansi sekitar 5% ketika menggunakan analisis statistik dengan ambang signifikansi 0,05. Koefisien muncul kembali untuk lebih menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Dengan menggunakan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah sebagai variabel independen, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi perdebatan kelemahan pengendalian internal. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi sumber data tingkat kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini menggunakan sampel yang sesuai dengan kriteria yang berlaku, yaitu seluruh 35 kabupaten pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan periode penelitian 2017–2019. sehingga menghasilkan 99 data sampel. Penelitian ini menggunakan periode observasi selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 4.1
Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
1.	Jumlah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	35
2.	a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian.	2
	b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diaudit oleh BPK-RI	0
3.	Jumlah Sampel Penelitian	33
4.	Jumlah Observasi Penelitian Selama 3 Tahun (33×3 Tahun)	99
	Total Keseluruhan Sampel	99

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	1263,404	396,4949	4499,869	6,89899
Median	1017	385	3375	7
Maximum	3579	1275	30971	14
Minimum	176	114	1700	1
Std. Dev.	941,2509	185,59	4284,214	2,749749
Observations	99	99	99	99

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Pada tabel 4.2 menunjukkan nilai paling rendah, nilai paling tinggi, nilai mean, nilai median, dan standar deviasi dari setiap variabel. Dibawah ini penjelasan dari setiap variabel yaitu:

- a. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai mean 1263,404 dengan nilai minimum 176, nilai maximum 3579 serta standar deviasi 941,2509. Kabupaten yang memiliki nilai PAD terkecil yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018. Kabupaten yang memiliki nilai PAD terbesar yaitu Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2019.
- b. Variabel belanja modal memiliki nilai mean 396,4949 dengan nilai minimum 114, nilai maximum 1275 serta standar deviasi 185,59. Kabupaten yang memiliki nilai belanja modal terkecil yaitu Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018. Kabupaten

yang memiliki nilai belanja terbesar yaitu Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017.

- c. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai mean 4499,869 dengan nilai minimum 1700, nilai maximum 30971 serta standar deviasi 4284,214. Kabupaten yang memiliki nilai ukuran pemerintah daerah terkecil yaitu Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Kabupaten yang memiliki nilai belanja terbesar yaitu Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018.

4.2.2. Estimasi Pemilihan Model

Model regresi dari data panel dijelaskan menggunakan Common Effect Model (CEM):

Tabel 4.3
Hasil Pengujian CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00045	0,000211	-2,10734	0,0377
X2	0,004523	0,001757	2,57453	0,0116
X3	-8,16E-05	6,20E-05	-1,3168	0,1911
C	5,852696	0,506473	11,5558	0,0000
Weighted Statistics				
R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998	
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098	
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589	
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923	
Prob(F-statistic)	0,00132			

Tabel 4.3 di atas merupakan hasil dari pengujian *Common Effect Model* (CEM).

4.2.3. Uji Regresi

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk membandingkan model CEM dan FEM. Jika ambang probabilitas F kurang dari 0,05 maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Jika tingkat probabilitas F lebih besar dari 0,05 maka Common Effect Model (CEM) yang sebaiknya digunakan. (Ghozali & Ratmono, 2017)

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,66645	(32,63)	0,8942
Cross-section Chi-square	28,86447	32	0,626

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa peluang terjadinya F adalah 0,626. Mengingat nilai probabilitas F lebih besar dari 0,05 maka *Common Effect Model* (CEM) merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan model FEM dan REM. FEM digunakan ketika probabilitas chi-kuadrat model kurang dari 0,05. Dalam skenario yang berbeda, Random Effect Model (REM) digunakan jika probabilitas chi-kuadrat lebih besar dari 0,05. (Ghozali & Ratmono, 2017)

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2,753922	3	0,4311

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 4.5 dapat dilihat probabilitas F sebesar 0,4311. Hal tersebut berarti nilai probabilitas $F > 0,05$, maka model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Random Effect Model (REM), digunakan persamaan pengali Lagrange. (Ghozali & Ratmono, 2017)

Tabel 4.6
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2,598841	92,68276	95,2816
	-0,1069	0	0

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

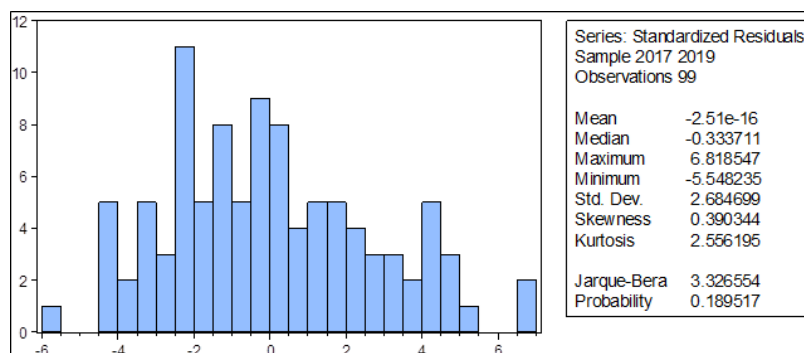
Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai *cross section* sebesar -0,1069. Dengan demikian, nilai *cross section* lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Common Effect Model* (CEM) dipilih sebagai model yang tepat..

4.2.4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, Uji Jarque-Bra untuk penilaian statistik normalitas digunakan. Jika tingkat probabilitas lebih besar dari 5% (0,05), data mungkin tampak normal. (Ghozali & Ratmono, 2017)

Grafik 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan grafik 4.1 hasil uji normalitas dengan Probabilitas yang diperoleh uji *Jarque-Bera* sebesar 0,189517 > 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian tersebar dengan baik.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah suatu variabel hadir akan model regresi yang memiliki hubungan akan ada yang serupa dengan yang lain. Multikolinearitas tidak akan ada jika korelasinya di luar 0,08. (Ghozali & Ratmono, 2017)

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1	-0,11901	0,118931	0,048075
X1	-0,11901	1	0,245758	0,139598
X2	0,118931	0,245758	1	0,804421
X3	0,048075	0,139598	0,804421	1

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai hubungan antar variabel lebih kecil dari 0,8. Dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.7 terbebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Gletser dengan prinsip jika ambang probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka akan terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali & Ratmono, 2017)

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00021	0,000172	-1,19614	0,2346
X2	-4,30E-05	0,001452	-0,02966	0,9764
X3	-5,94E-05	6,16E-05	-0,96491	0,3370
C	2,719051	0,422749	6,431838	0,0000
R-squared	0,049407	Mean dependent var		2,175247
Adjusted R-squared	0,019388	S.D. dependent var		1,558084
S.E. of regression	1,542905	Akaike info criterion		3,744777
Sum squared resid	226,1529	Schwarz criterion		3,84963
Log likelihood	-181,366	Hannan-Quinn criter.		3,7872
F-statistic	1,64588	Durbin-Watson stat		2,125376
Prob(F-statistic)	0,183995			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Hasil pengujian pada tabel 4.8 diatas, nilai probabilitas dari setiap variabel bebas > 0.05 , maka dari itu bisa dibuktikan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak terjadi.

d. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Selama tidak terjadi autokorelasi ketika Durbin Watson hadir pada rentang $dU < DW < 4 - dU$, maka terdapat risiko terjadinya kesimpulan. Ini merupakan tabel uji regresif dimana nilai DW digunakan untuk melakukan autokorelasi uji.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923
Prob(F-statistic)	0,00132		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 4.9 diatas, nilai DW sebesar 1,906923. Pada tabel DW besarnya dL yaitu 1.2576 dan besarnya dU yaitu 1.6511. Dan untuk nilai $4 - dL$ sebesar 2.7424 dan nilai $4 - dU$ sebesar 2.3489. Dari hasil tersebut maka nilai DW ada pada rentang $dU < DW < 4 - dU$. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa data bebas dari masalah autokorelasi.

4.2.5. Uji Ketepatan Model

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien mengidentifikasi perbedaan antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 kecil maka variabel dapat dengan jelas menyatakan variasi variabel secara jelas dan ringkas. Sebaliknya, jika R^2 lebih besar dari 1, variabel tersebut akan mampu menyampaikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk menghasilkan variasi yang salah dalam variabel tersebut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923
Prob(F-statistic)	0,00132		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,124618. Hal tersebut berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sebesar 12,46%.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk membandingkan variabel biner dan keterikatan agar dapat memahami niat orang lain (Sig). Jika nilai sig 0,05 maka terdapat perbedaan konkuren yang signifikan antara variabel independen dan dependen.

Sebaliknya, jika nilai sig > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923
Prob(F-statistic)	0,00132		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa 0,00132 merupakan nilai probabilitas (F-statistik). Terdapat pengaruh yang sinkron antara variabel independen dan dependen, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas > 0,05.

4.2.6. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan Common Effect Model (CEM) untuk memahami dampak lokasi, belanja, dan penduduk asli Pemerintah Daerah terhadap aktivitas ilmiah internal..

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00045	0,000211	-2,10734	0,0377
X2	0,004523	0,001757	2,57453	0,0116
X3	-8,16E-05	6,20E-05	-1,3168	0,1911
C	5,852696	0,506473	11,5558	0,0000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berikut ini adalah rumus regresi data panel:

$$Y = 5,852696 - 0,00045 * X_1 + 0,004523 * X_2 - 8,16E-05 * X_3 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 5,852696. Artinya apabila variabel independen dalam penelitian ini bernilai 0, maka nilai Kelemahan Pengendalian Internal sebesar 5,852696.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,00045. Artinya, kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan Kelemahan Pengendalian Internal sebesar -0,00045.
3. Nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar 0,004523. Artinya, kenaikan Belanja Modal sebesar 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan Kelemahan Pengendalian Internal sebesar 0,004523.
4. Nilai koefisien regresi Ukuran Pemerintah Daerah sebesar -8,16E-05. Artinya, kenaikan Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan Kelemahan Pengendalian Internal sebesar -8,16E-05.

4.2.7. Uji Hipotesis

Uji t digunakan penelitian ini untuk menguji validitas hipotesis. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independent

terhadap variabel dependen jika probabilitas nilai signifikan sebesar 0,05.

Tabel 4.13
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00045	0,000211	-2,10734	0,0377
X2	0,004523	0,001757	2,57453	0,0116
X3	-8,16E-05	6,20E-05	-1,3168	0,1911
C	5,852696	0,506473	11,5558	0,0000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

1. Variabel X1 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -2,10734 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar $0,0377 < 0,05$. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh negatif terhadap variabel Y.
2. Variabel X2 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2,57453 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar $0,0116 < 0,05$. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y.
3. Variabel X3 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -1,3168 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar $0,1911 > 0,05$. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan hipotesis yang dapat diterima dan ditolak pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	Ditolak
H2	Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	Diterima
H3	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	Ditolak

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Hipotesis pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,00045 dengan probabilitas sebesar 0,0377. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal karena nilai probabilitas $< 0,05$ hipotesis pertama (H1) ditolak.

Pada analisis deskriptif penelitian ini, menghasilkan nilai minimum 176 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 dengan skor 7 untuk kelemahan pengendalian internal. Selain itu, nilai maksimum 3579 dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dengan skor 5 untuk kelemahan pengendalian internal.

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan daerah yang biasanya timbul dalam volume yang tidak terlalu besar pada setiap transaksinya tetapi terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam menghimpun dana untuk kebutuhan daerah yang bersangkutan. dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan. (Saferi & Mulyani, 2020)

Pemegang tentunya akan mengalami kendala akibat bertambahnya jumlah sumber pendapatan yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Sebab, dengan adanya pos-pos rawan, Pendapatan Asli Daerah bisa menjadi sumber insiden dan penipuan besar-besaran. Pemantauan pendapatan pemerintah daerah akan menjadi tantangan jika mereka mempunyai banyak posisi yang rentan dan pendapatan yang tinggi. (Saferi & Mulyani, 2020)

Untuk meminimalisir terjadinya kondisi tersebut maka perlu dikembangkan sistem internal peer review baik dari dalam maupun luar organisasi. Penyelewengan pendapatan daerah dapat berupa eksploitasi dana daerah yang tidak berdasarkan ketentuan hukum, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tindakan korupsi atau penggelapan. (Saferi & Mulyani, 2020)

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Merina et al., 2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan Pengendalian internal. Hal ini disebabkan oleh kualitas pekerjaan pekerja magang tidak akan terpengaruh secara negatif oleh peningkatan atau, lebih khusus lagi, penurunan pendapatan dari negara luar. Sebab, untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah telah memperhatikan dan/atau mempersiapkan hasil anggaran pendapatan dan belanja daerah. pekerja yang jujur. Menerapkan kebijakan efektif yang memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tujuan pemerintah kota.

Sejalan dengan penelitian (Saferi & Mulyani, 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan Pengendalian internal. Akibatnya, skenario lemahnya pengendalian internal pemerintah daerah tidak akan berdampak pada kenaikan atau penurunan PAD. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan PAD yang lebih kuat belum tentu lebih baik dalam perencanaan internal dibandingkan dengan Pemerintah Daerah dengan PAD yang lebih lemah.

4.3.2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Hipotesis kedua yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kelemahan Pengendalian Internal. Berdasarkan tabel 4.13

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,004523 dengan probabilitas sebesar 0,0116. Artinya Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal karena nilai probabilitas $< 0,05$ hipotesis kedua (H2) diterima.

Pada analisis deskriptif penelitian ini, menghasilkan nilai minimum 114 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dengan skor 5 untuk kelemahan pengendalian internal. Selain itu, nilai maksimum 1275 dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017 dengan skor 8 untuk kelemahan pengendalian internal.

Negara harus mengeluarkan dana untuk menciptakan modal atau aset tetap bagi kelangsungan operasional satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dapat dianggap mencakup perolehan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, sistem dan jaringan irigasi, serta aset berwujud lainnya yang belum ditangani. (Safitri & Kiswanto, 2019)

Menjadi bagian dari pertukaran modal dengan perdagangan barang fisik atau berwujud sangatlah tidak dapat diandalkan. Ketika suatu negara memiliki sejumlah besar modal yang terkait dengannya, tingkat kebutuhan aset pengadaan menjadi semakin tinggi. Proses perolehan aset masih dilakukan di dalam batas

wilayah pemerintahan kabupaten baik dengan mekanisme lelang maupun tender. (Iqbal et al., 2017).

Otoritas daerah yang dapat memenuhi spesifikasi dan memberikan penawaran terbaik akan dipilih untuk melaksanakan proyek pembelian aset tetap. Pemerintah khawatir dengan kondisi yang ditimbulkan oleh proyek penjualan barang ini karena memiliki sejumlah risiko. BPK menyadari masih terdapat kendala dalam penandaan aset. Tampaknya masuk akal jika kemungkinan terjadinya penipuan dalam berbagai skema pengadaan barang yang dikelola pemerintah daerah semakin meningkat. (Iqbal et al., 2017).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Safitri & Kiswanto, 2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena proses ini sangat rentan terhadap korupsi, hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kelemahan pengendalian internal.

4.3.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Hipotesis ketiga yaitu Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-8,16E-05$ dengan probabilitas sebesar 0,1911. Artinya Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian

internal karena nilai probabilitas $> 0,05$ hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Pada analisis deskriptif penelitian ini, menghasilkan nilai minimum 1700 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dengan skor 11 untuk kelemahan pengendalian internal. Selain itu, nilai maksimum 30971 dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018 dengan skor 8 untuk kelemahan pengendalian internal.

Logo entitas mana pun dapat dianggap sebagai grafik dasar yang dapat dilihat di luar organisasi. Organisasi berskala besar diasumsikan memiliki landasan ekonomi yang kuat dan mampu tumbuh serta berhasil melaksanakan promosi internal. Kantor pusat organisasi manapun juga menampilkan volume aktivitas yang dilakukan di sana. Organisasi dengan ukuran yang lebih besar biasanya memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi, sedangkan pemerintah dengan ukuran yang lebih kecil biasanya memiliki tingkat aktivitas yang lebih rendah. (Alawiyah et al., 2020)

Satu-satunya badan pemerintah yang termasuk dalam definisi organisasi “nirlaba” adalah pemerintah daerah, yang juga mempunyai seperangkat aset atau indikator tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan lokasinya. Pemerintah daerah mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendukung perekonomian daerahnya. Kepemilikan aset pemerintah daerah

dalam jumlah besar akan mengingatkan kelompok manajemen pemerintah akan perlunya peningkatan perlindungan aset. Pemerintah akan berupaya memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang dimiliki untuk menjaga aset daerah dalam upaya menurunkan frekuensi bencana. Anda harus memilih pekerja magang dengan perilaku yang sesuai saat menangani aset jika Anda ingin melanjutkan dengan hati-hati. (Safitri & Kiswanto, 2019)

Berdasarkan penelitian ini, batas wilayah kabupaten digambar oleh pemerintah dengan menggunakan total aset sebagai proksi batas wilayah kabupaten. Jumlah aset digunakan sebagai penanda batas karena dapat menyampaikan pola pikir pemerintah daerah ketika mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan organisasi. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mempunyai akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih besar untuk pelaksanaan program pemagangan, termasuk kegiatan pelatihan dan konsultasi. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah pemerintahan daerah akan berdampak buruk terhadap perekrutan aparatur pemerintah daerah dari dalam. (Pasha, 2020)

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Merina et al., 2021) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan oleh besarnya kewenangan pemerintah di suatu

daerah tanpa adanya dukungan yang memadai terhadap praktik perekrutan pekerja magang. Sebab, dengan mengakui dan memanfaatkan sumber daya lokal, pemerintah daerah telah berhasil mencapai kedaulatan lingkungan hidup. Agar dapat bermanfaat bagi masyarakat atau masyarakat luas, pemerintah kini dapat memanfaatkan informasi tersebut. Namun, beberapa bukti empiris juga mengakui adanya pengaturan kontroversial yang memungkinkan pemerintah memperluas yurisdiksinya kepada beberapa peserta magang..

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian dan analisis data serta pembahasan yang ditawarkan pada bab sebelumnya.:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal, diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal.
2. Pengaruh belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal, diperoleh hasil bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.
3. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal, diperoleh hasil bahwa variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan secermat mungkin, seperti berikut ini:

1. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena fokus utamanya adalah pada pemerintahan Jawa Tengah.
2. Karena laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota hanya diterbitkan sesekali, maka peneliti harus melihat ke Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif.

5.3. Saran

Berikut saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang dibuat berdasarkan analisis pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian:

1. Karena koefisien determinasi pada penelitian ini tidak terlalu tinggi, maka peneliti selanjutnya sebaiknya memasukkan lebih banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya pengendalian internal. Elemen-elemen ini mencakup kompleksitas geografis atau ekspansi ekonomi.
2. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu membujuk setiap daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan secara jujur dan terbuka di website pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadillah Adha, Nunuy Nur Afiah, & Arie Pratama. (2019). Pengaruh Ukuran Entitas Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Kementerian Pupr. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 3(2), 122–134.
- Aini, F. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD kompleksitas daerah dan belanja modal terhadap pengendalian intern pemerintah daerah. *Journal Of Economic*, 4(1).
- Basuki, A. T. R. I., & Prawoto, N. (2017). Aplikasi Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Raja Grafindo Persada*.
- Citra Indah Merina, Verawaty, & Diana Rahmawati. (2021). Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Conference on Economic and Business Innovation*.
- Fakhry Seftian Pasha. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Ukuran Entitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)*.
- Fama, & Jensen. (1983). The Separation of Ownership and Control. . *Journal of Law and Economics*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10) (2nd ed.). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies*, 204–210.
- Hartono, R., Mahmud, A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*, 1–13.
- <https://jateng.bpk.go.id/bpk-jateng-serahkan-lhp-atas-lkpd-kabupaten-karanganyar-ta-2018/>
- <https://www.bpk.go.id/>
- Iqbal, M., Tanjung, A. R., & Supriono. (2017). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan

- Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau dan Sumbar). *JOM Fekon*, 4(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kiswanto, Ain Hajawiyah, & Yunindya Lazty Mahera. (2020). Factors Influencing The Weaknesses Of Internal Control Of Local Governments In Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 122–129.
- Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Original Local Government Revenue (PAD), dan Capital expenditure sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Akuntansi Ukrida*, 9(1), 1–17.
- M. Saferi, & Erly Mulyani. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2234–2249.
- Martani, D., & Zaelani, F. (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 21–22.
- Melia Andesti, & Henri Agustin. (2022). Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(1), 131–149.
- Petrovits, C., Shakespeare, C., & Shih, A. (2010). The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *Accounting Review*, 86(1), 325–357.
- Putri, N. K. , & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–8.
- Rahmiyatun, F., & Lestari, R. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran, Pendapatan Asli Daerah Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(1), 13–23.
- Rizal Yaya, & Halim Sri Suprobo. (2019). Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government in Indonesia . *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 296–309.

- Safitri, S. A., & Kiswanto. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Determinan Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Equilibria Pendidikan*, 4(1), 1–9.
- Samhah, H. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(2).
- Saputro, E. A., & Mahmud, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–9.
- Shalsadila Putri Gumilan, & Rino Dwi Putra. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Academic Conference of Accounting J*, 1(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sylvia Apriyana Safitri, & Kiswanto. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Determinan Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 4(1).
- Tina Tuti Alawiyah, Mahendro Sumardjo, & Dewi Darmastuti. (2020). Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Financial Internal Control and Government*.
- Yeni, E., Fauziati, P., & N, N. (2012). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No	Bulan	September				Oktober				November				Desember			
	Kegiatan	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penyusunan Proposal	x	x	x	x	x	x										
2.	Konsultasi							x				x					
3.	Revisi Proposal								x	x	x		x	x	x	x	x
4.	Pengumpulan Data																
5.	Analisis Data																
6.	Penulisan Akhir Naskah																
7.	Pendaftaran Munaqosah																
8.	Munaqosah																

Jadwal Penelitian

No	Bulan	Januari				Februari				Maret				April			
	Kegiatan	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penyusunan Proposal																
2.	Konsultasi																
3.	Revisi Proposal	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
4.	Pengumpulan Data																
5.	Analisis Data																
6.	Penulisan Akhir Naskah																
7.	Pendaftaran Munagosah																
8.	Munaqosah																

Lampiran 2 Hasil Pengumpulan Data

No	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
1.	Jumlah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	35
2.	a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian.	2
	b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diaudit oleh BPK-RI	0
3.	Jumlah Sampel Penelitian	33
4.	Jumlah Observasi Penelitian Selama 3 Tahun (33×3 Tahun)	99
	Total Keseluruhan Sampel	99

Lampiran 3 Data Variabel Dependen dan Independen

Kelemahan Pengendalian Internal (Y)

No	Nama Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kabupaten Banjarnegara	4	10	4
2	Kabupaten Banyumas	8	7	7
3	Kabupaten Batang	11	12	4
4	Kabupaten Blora	5	7	11
5	Kabupaten Boyolali	12	8	4
6	Kabupaten Brebes	8	10	5
7	Kabupaten Cilacap	12	5	5
8	Kabupaten Demak	7	7	4
9	Kabupaten Grobogan	6	7	6
10	Kabupaten Jepara	12	8	6
11	Kabupaten Karanganyar	8	4	5
12	Kabupaten Kebumen	14	9	5
13	Kabupaten Kendal	9	6	3
14	Kabupaten Klaten	6	9	5
15	Kabupaten Magelang	10	6	3
16	Kabupaten Pati	9	7	3
17	Kabupaten Pekalongan	5	7	7
18	Kabupaten Pemasang	11	8	3
19	Kabupaten Purbalingga	9	6	4
20	Kabupaten Purworejo	5	3	5
21	Kabupaten Rembang	11	10	6
22	Kabupaten Semarang	9	3	6

23	Kabupaten Sragen	10	8	6
24	Kabupaten Sukoharjo	10	6	3
25	Kabupaten Tegal	8	4	6
26	Kabupaten Temanggung	5	5	8
27	Kabupaten Wonosobo	14	6	8
28	Kota Magelang	4	6	1
29	Kota Pekalongan	8	7	5
30	Kota Salatiga	9	11	3
31	Kota Semarang	8	8	9
32	Kota Surakarta	11	5	5
33	Kota Tegal	8	5	2

Pendapatan Asli Daerah (X1)

No	Nama Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kabupaten Banjarnegara	309	251	259
2	Kabupaten Banyumas	641	675	708
3	Kabupaten Batang	235	252	270
4	Kabupaten Blora	287	248	328
5	Kabupaten Boyolali	221	229	236
6	Kabupaten Brebes	262	2950	2714
7	Kabupaten Cilacap	2860	2883	3579
8	Kabupaten Demak	2105	1958	2132
9	Kabupaten Grobogan	227	2246	2309
10	Kabupaten Jepara	339	384	402
11	Kabupaten Karanganyar	1934	2062	2063
12	Kabupaten Kebumen	446	495	525
13	Kabupaten Kendal	2061	1957	2044
14	Kabupaten Klaten	2304	2314	2342
15	Kabupaten Magelang	446	350	395
16	Kabupaten Pati	2588	2461	2490
17	Kabupaten Pekalongan	313	355	373
18	Kabupaten Pemasang	2166	2280	2347
19	Kabupaten Purbalingga	1813	1870	1874
20	Kabupaten Purworejo	1783	1740	1874
21	Kabupaten Rembang	1532	1605	1603
22	Kabupaten Semarang	411	412	442
23	Kabupaten Sragen	2079	2102	2203
24	Kabupaten Sukoharjo	1963	2086	2216

25	Kabupaten Tegal	2241	2577	2432
26	Kabupaten Temanggung	325	278	305
27	Kabupaten Wonosobo	323	239	233
28	Kota Magelang	904	921	988
29	Kota Pekalongan	204	176	226
30	Kota Salatiga	235	221	225
31	Kota Semarang	1863	1935	2230
32	Kota Surakarta	539	547	579
33	Kota Tegal	1056	1017	1041

Belanja Modal (X2)

No	Nama Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kabupaten Banjarnegara	563	475	358
2	Kabupaten Banyumas	472	525	479
3	Kabupaten Batang	164	163	212
4	Kabupaten Blora	421	499	467
5	Kabupaten Boyolali	420	499	531
6	Kabupaten Brebes	593	527	622
7	Kabupaten Cilacap	651	551	663
8	Kabupaten Demak	457	415	455
9	Kabupaten Grobogan	603	423	449
10	Kabupaten Jepara	404	398	325
11	Kabupaten Karanganyar	272	262	287
12	Kabupaten Kebumen	434	370	366
13	Kabupaten Kendal	321	285	284
14	Kabupaten Klaten	365	385	308
15	Kabupaten Magelang	503	502	389
16	Kabupaten Pati	449	439	405
17	Kabupaten Pekalongan	337	431	345
18	Kabupaten Pemasang	336	291	348
19	Kabupaten Purbalingga	400	271	262
20	Kabupaten Purworejo	465	366	327
21	Kabupaten Rembang	354	309	207
22	Kabupaten Semarang	346	405	393
23	Kabupaten Sragen	350	428	249
24	Kabupaten Sukoharjo	251	388	351
25	Kabupaten Tegal	438	418	434
26	Kabupaten Temanggung	313	186	223

27	Kabupaten Wonosobo	311	382	431
28	Kota Magelang	233	237	272
29	Kota Pekalongan	221	146	182
30	Kota Salatiga	218	222	184
31	Kota Semarang	1275	1228	1055
32	Kota Surakarta	470	524	544
33	Kota Tegal	206	114	166

Ukuran Pemerintah Daerah (X3)

No	Nama Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kabupaten Banjarnegara	4127	4356	4469
2	Kabupaten Banyumas	5464	6420	6227
3	Kabupaten Batang	2403	2512	2664
4	Kabupaten Blora	2546	2917	3363
5	Kabupaten Boyolali	2614	3116	3770
6	Kabupaten Brebes	3470	3367	4187
7	Kabupaten Cilacap	3874	4590	5735
8	Kabupaten Demak	4927	5085	5450
9	Kabupaten Grobogan	2828	3505	3643
10	Kabupaten Jepara	5886	6132	6497
11	Kabupaten Karanganyar	2916	3191	3477
12	Kabupaten Kebumen	4410	4549	4482
13	Kabupaten Kendal	3015	3081	3027
14	Kabupaten Klaten	3727	4001	4157
15	Kabupaten Magelang	3019	3142	3271
16	Kabupaten Pati	6007	6191	6440
17	Kabupaten Pekalongan	2470	2763	3021
18	Kabupaten Pemasang	3228	3513	3787
19	Kabupaten Purbalingga	2406	2622	2846
20	Kabupaten Purworejo	2589	2773	2987
21	Kabupaten Rembang	1700	2083	2143
22	Kabupaten Semarang	3112	4381	4690
23	Kabupaten Sragen	2906	3375	3942
24	Kabupaten Sukoharjo	4503	4738	5195
25	Kabupaten Tegal	2991	3184	3378
26	Kabupaten Temanggung	2943	3105	3240
27	Kabupaten Wonosobo	2679	3070	3391
28	Kota Magelang	3579	3865	4013

29	Kota Pekalongan	2311	2463	2857
30	Kota Salatiga	3034	4114	3072
31	Kota Semarang	30041	30971	18159
32	Kota Surakarta	7470	7734	11719
33	Kota Tegal	2264	2403	2418

Lampiran 4 Hasil Olah Data

Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	1263,404	396,4949	4499,869	6,89899
Median	1017	385	3375	7
Maximum	3579	1275	30971	14
Minimum	176	114	1700	1
Std. Dev.	941,2509	185,59	4284,214	2,749749
Observations	99	99	99	99

Hasil Pengujian CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00045	0,000211	-2,10734	0,0377
X2	0,004523	0,001757	2,57453	0,0116
X3	-8,16E-05	6,20E-05	-1,3168	0,1911
C	5,852696	0,506473	11,5558	0,0000
Weighted Statistics				
R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998	
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098	
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589	
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923	
Prob(F-statistic)	0,00132			

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,66645	(32,63)	0,8942
Cross-section Chi-square	28,86447	32	0,626

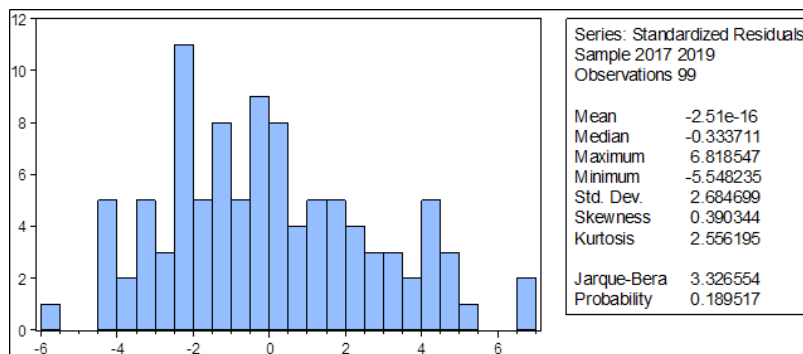
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2,753922	3	0,4311

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2,598841	92,68276	95,2816
	-0,1069	0	0

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1	-0,11901	0,118931	0,048075
X1	-0,11901	1	0,245758	0,139598
X2	0,118931	0,245758	1	0,804421
X3	0,048075	0,139598	0,804421	1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00021	0,000172	-1,19614	0,2346
X2	-4,30E-05	0,001452	-0,02966	0,9764
X3	-5,94E-05	6,16E-05	-0,96491	0,3370
C	2,719051	0,422749	6,431838	0,0000
R-squared	0,049407	Mean dependent var		2,175247
Adjusted R-squared	0,019388	S.D. dependent var		1,558084
S.E. of regression	1,542905	Akaike info criterion		3,744777
Sum squared resid	226,1529	Schwarz criterion		3,84963
Log likelihood	-181,366	Hannan-Quinn criter.		3,7872
F-statistic	1,64588	Durbin-Watson stat		2,125376
Prob(F-statistic)	0,183995			

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923
Prob(F-statistic)	0,00132		

Hasil Uji F

R-squared	0,151416	Mean dependent var	9,419998
Adjusted R-squared	0,124618	S.D. dependent var	7,496098
S.E. of regression	2,689079	Sum squared resid	686,9589
F-statistic	5,650386	Durbin-Watson stat	1,906923
Prob(F-statistic)	0,00132		

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00045	0,000211	-2,10734	0,0377
X2	0,004523	0,001757	2,57453	0,0116
X3	-8,16E-05	6,20E-05	-1,3168	0,1911
C	5,852696	0,506473	11,5558	0,0000

Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,00045	0,000211	-2,10734	0,0377
X2	0,004523	0,001757	2,57453	0,0116
X3	-8,16E-05	6,20E-05	-1,3168	0,1911
C	5,852696	0,506473	11,5558	0,0000

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Satrio Bayu Segoro
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 21 April 2001
Agama : Islam
Alamat : Badranasri 01/12, Cangakan, Karanganyar
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
No. HP : 089630972625
E-mail : satriobayusegoro@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. TKIT INSAN KAMIL KARANGANYAR (2005-2007)**
- 2. SDIT INSAN KAMIL KARANGANYAR (2007-2013)**
- 3. SMPIT INSAN KAMIL KARANGANYAR (2013-2016)**
- 4. MAN 01 KARANGANYAR (2016-2019)**

Lampiran 6 Cek Plagiarisme




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id. – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Satrio Bayu Segoro
NIM : 195221149
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL
Paper ID : 2194441020
Date : 14-12-2023
Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 30%

Sukoharjo, 20 Desember 2023

Farah Nilawati, S.Sos.I
NIK: 198906072018102003

LAMPIRAN

